

Judul : Hari Tani Nasional, pembangunan pangan sejahteraan Petani
Tanggal : Sabtu, 26 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Hari Tani Nasional Pembangunan Pangan Sejahteraan Petani

FOTO: DPR GO.ID



Slamet

ANGGOTA Komisi IV DPR Slamet mengatakan, peringatan Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk menempatkan kesejahteraan petani sebagai arah utama pembangunan pangan. Penguatan legislasi, peningkatan anggaran ketahanan pangan, dan kebijakan pelaksanaannya perlu saling mendukung untuk memberikan kepastian usaha serta penghidupan yang layak bagi petani.

Menurut Slamet, swasembada, kemandirian, dan kedaulatan pangan akan semakin jauh dari kenyataan selama petaninya belum sejahtera. Karena itu, setiap kebijakan pangan perlu menjawab pertanyaan mendasar, "apakah petani semakin terlindungi, pendapatannya meningkat, dan masa depannya lebih terjamin," ujar Slamet di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Diketahui, Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai pengingat karena pada tanggal itu tahun 1960, Presiden Soekarno menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Slamet melanjutkan, keberhasilan tersebut perlu dimulai dari kepastian akses dan penguasaan lahan. Karena itu,

implementasikan segera undang-undang pengaturan konflik agraria melalui perlindungan lahan pertanian, serta pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat nyata bagi petani. "Petani membutuhkan kepastian atas lahan yang menjadi sumber penghidupannya," tandas politisi PKS ini.

Untuk itu, ia meminta penyelesaian konflik agraria dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum, kemudian diikuti akses permodalan, sarana produksi, pendampingan, dan pasar. Tujuannya agar lahan dapat dikelola secara produktif.

Selain itu, ia mendorong peningkatan anggaran ketahanan pangan yang disertai penajaman prioritas dan ketepatan pelaksanaan. Dukungan anggaran diarahkan untuk memperbaiki irigasi, menjamin ketersediaan benih dan pupuk, memperkuat penyuluhan, serta melindungi petani dari risiko usaha dan gejolak harga.

Ia menambahkan, kebijakan turunan perlu memastikan bantuan mudah diakses, penyaluran tepat waktu, dan hasil panen terserap dengan harga yang layak. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar dukungan sejak produksi hingga pemasaran benar-benar meningkatkan pendapatan bersih petani.

"Pemerintah perlu hadir secara utuh. Kepastian lahan, dukungan anggaran, dan perlindungan pasar mesti berjalan bersama. Karena keberhasilannya terlihat pada kesejahteraan keluarga petani," imbuh legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Slamet menilai, kesejahteraan merupakan fondasi regenerasi petani. Ketika petani mampu memberikan kehidupan yang layak, profesi tersebut akan semakin membanggakan dan menarik bagi generasi muda. ■ TIF